

ABSTRAK

Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya diwajibkan untuk mengalokasikan sedikitnya 30% dari ruang atau wilayahnya untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), di mana 20% diperuntukan bagi RTH publik dan 10% diperuntukan bagi RTH privat pada lahan-lahan yang dimiliki oleh swasta atau masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung, meskipun RTH Kota Bandung relatif meningkat dari tahun 2007 sampai 2017, yaitu dari 8,76% pada tahun 2007 menjadi 13,24% pada tahun 2017. Tetapi jika mengacu terhadap capaian kinerja RPJMD Kota Bandung dalam peningkatan RTH publik dan privat, harusnya pada tahun 2018 ini RTH Kota Bandung sudah mencapai 23% dari luasan Kota Bandung. Berdasarkan hal tersebut Kota Bandung menjadi salah satu Kota di Indonesia dengan kepadatan penduduk cukup tinggi, namun presentase RTH masih kurang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana pelaksanaan, kendala, dan upaya dalam melaksanakan Kebijakan Perda Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teori dari Merllie S. Grindle yang dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda tersebut masih belum optimal dikarenakan beberapa indikator hambatan seperti: derajat perubahan, program, sumber daya dan respon dari pelaksana kebijakan, selain itu berbagai hambatan yaitu politik, ekonomi, sumber daya manusia dan peralatan, serta hukum belum dapat teratasi. Namun beberapa upaya masih tetap dilakukan agar pelaksanaan Perda ini dapat terus meningkat seperti, (a) Persyaratan Penyediaan RTH pada Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB); (b) Pemanfaatan Lahan Publik; (c) Pembelian Tanah; dan (d) selalu mengadakan Monitoring Evaluasi.

Kata Kunci: Impelmentasi Kebijakan, Rencana Detail Tata Ruang, Peraturan Zonasi, Ruang Terbuka Hijau, Kota Bandung.

ABSTRACT

The law number 26 of 2007 about “Penataan Ruang” has mandated that every city in its spatial plan is required to allocate at least 30% of its space or territory to Green Open Space (RTH), where 20% is intended for public open space and 10% for private RTHs on lands owned by private or community. Based on data from the Department of Housing and Settlement Area, Land and Garden City of Bandung, although Bandung RTH relatively increased from 2007 to 2017, is from 8.76% in 2007 to 13.24% in 2017. But if referring to the achievements performance of RPJMD Bandung in the increasing public and private RTH, it should be in 2018, Bandung’s RTH has reached 23% of the city of Bandung. Therefore, Bandung became one of the cities in Indonesia with high population density, but the percentage of green space is still lacking. The research aims are to know and to describe how the implementation, constraints, and efforts in the implementation of Policy Regulation No. 10 of 2015 About “Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) and Peraturan Zonasi (PZ) Kota Bandung.” This research uses the theory of Merllie S. Grindle, known as Implementation as A Political and Administrative Process. The research used descriptive with qualitative approach method. The techniques used are observation, interviews, and documents. The results of this research indicate that the implementation of the regulation is still not optimal due to some obstacle indicators such as the degree of change, program, resources, and responses from policy implementers, besides various obstacles such as politics, economy, human resources and equipment, and law cannot be resolved. However, efforts are still being made to ensure that the implementation of this regulation can continue to increase, such as (a) the provision of green space in building permits (IMB); (b) Utilization of Public Land; (c) Land Acquisition; and (d) always conduct Evaluation Monitoring.

Keywords: *Policy Implementation, Rencana Detail Tata Ruang, Peraturan Zonasi, Green Open Space, Bandung City*